



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEDDY LUGITO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 623410

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 11.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/360 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 883 m2/550 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 947 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , Rp. 1.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 950.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.183.800.002
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	16.053.800.002

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.053.800.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.